

Kasultanan Jogja Dituntut Jaga Eksistensinya

YOGYAKARTA - Hingga saat ini, Kasultanan Yogyakarta merupakan kasultanan masih tetap terkenal dengan eksistensinya menjaga budaya, adat istiadat serta tradisi sekalipun sudah bergabung dengan Indonesia. Namun, dengan adanya konflik internal di kalangan keluarga kasultanan, memaksa masyarakat turut terlibat karena kepeduliannya. Karena itu, Kasultanan Yogyakarta harus tetap menjaga eksistensinya.

Pengamat sosial politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono mengatakan hal itu dalam diskusi tentang konflik keraton, kemarin.

Menurutnya, dari zaman dulu setiap kasultanan pasti mengalami konflik-konflik internal terkait dengan suksesi atau pergantian kekuasaan. Hanya bedanya, jika konflik pada kasultanan zaman dulu diwarnai pertikaian berdarah-darah, masa sekarang harusnya tidak berlaku lagi.

"Karena masih ada jalan lain lebih manusiawi dan beradab yang bisa ditempuh. Kasultanan Yogyakarta dalam hal ini, seharusnya juga bisa menyelesaikan permasalahannya dengan cara lebih manusiawi dan beradab. Jangan sampai terjadi di masa lalu terulang kembali di masa sekarang, hanya karena permasalahan suksesi belum juga terselesaikan," jelasnya.

Jalan Mulus

Ia menilai dari segi tatanan pemerintahan, konflik terjadi terkait suksesi pada internal Keraton Yogyakarta secara tidak langsung berimbas pada masyarakat Jogja.

Pasalnya, Keraton terintegrasi dengan Pemda sehingga apa pun berkaitan dengan keraton juga ikut berkaitan kepentingan publik di

Yogyakarta.

"Kasultanan Yogyakarta sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah. Adanya UUK (Undang-undang Keistimewaan) juga makin mengukuhkan Sultan Yogyakarta juga sekaligus sebagai Gubernur Yogyakarta.

Kemudian beberapa waktu terakhir Sultan mengeluarkan sabda raja sebenarnya terkait dengan suksesi (pergantian kekuasaan).

Karena terkait suksesi inilah maka berpengaruh pada masyarakat, mau tidak mau hal ini melibatkan masyarakat secara psikologis atau pun kepentingan-kepentingan lainnya," papar Tunjung.

Tunjung pun melihat, sabda raja seolah-olah sebagai jalan mulus untuk melakukan suksesi dengan memberikan gelar Mangkubumi kepada putri sulungnya.

Ini kian membuktikan bahwa Sultan memang ingin menjadikan GKR Pembayun sebagai putri mahkota.

Masalah muncul kemudian jika GKR Pembayun juga didaulat menjadi Gubernur Yogyakarta. Padahal, dari Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta sudah ditetapkan bahwa Gubernur seorang laki-laki.

"Sementara di sisi lain, masih ada saudara-saudara Sultan laki-laki juga merasa memiliki hak untuk itu. Lain halnya kalau Sultan tidak punya saudara laki-laki sehingga hal inilah kemudian juga memicu konflik di kalangan keluarga Kasultanan Yogyakarta dan terpaksa ikut melibatkan masyarakat Yogyakarta. Sebab ini juga sebenarnya bukan karena soal sensitif gender atau bukan, tapi ini lebih pada masalah budaya, tradisi, dan adat," ungkapnya. (D19-52)